

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir adalah kejadian alam dimana suatu daerah atau dataran yang biasanya kering menjadi terendam air. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir terjadi karena banyak hal seperti hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai, sungai, danau atau lautan.

Banjir sangat berbahaya memiliki kekuatan yang besar dan berpotensi merugikan kehidupan manusia dan dimana bisa menyebabkan kerusakan luas di berbagai aspek kehidupan manusia. Jakarta adalah daerah perkotaan yang statusnya sebagai Ibukota Negara Indonesia (Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1964). Jakarta merupakan Kota Metropolitan, dan salah satu pusat kota terbesar di negara Indonesia yang sekarang sedang berkembang pesat dengan banyaknya perkembangan industri, bisnis, dan pembangunannya. Salah satu sisi negatifnya dari perkembangannya adalah, salah satu contohnya adalah wilayah/taman penghijauan/wilayah penghijauan di Jakarta yang dihadapkan masalah seperti bencana banjir, jarena wilayah hijau digunakan untuk permukiman. Kondisi seperti ini, disebabkan dengan diiringnya jumlah penduduk yang terus meningkat dari setiap tahunnya.

Sebagai kota yang berada didataran rendah, Jakarta tidak terlepas dari ancaman banjir yang sewaktu-waktu dapat menyerang. Menurut catatan sejarah, Ibukota Jakarta telah dilanda banjir sejak tahun 1621. Salah satu bencana banjir

terparah yang pernah terjadi di Jakarta adalah banjir yang terjadi di bulan Februari 1918. Saat itu hampir sebagian besar wilayah Jakarta terendam banjir. Daerah yang terparah saat ini adalah Gunung Sahari, Kampung Tambora, Suteng, Kampung Klenteng akibat bendungan kali Grogol yang jebol.

Hingga kini banjir pun belum berhenti melanda Jakarta. Apalagi ketika musim penghujan telah tiba. Oleh karena banjir yang terus menerus melanda sebagian wilayah di Jakarta kini kota Jakarta telah terkenal dengan Kota Banjir. Walau demikian warga dan Pemerintah Jakarta tidak berhenti mencoba menanggulangi banjir di Ibukota.

Rumah-rumah dan bangunan liar yang berada dipinggir kali atau sungai yang di bangun diatas tanah milik negara merupakan permasalahan yang kompleks apabila tidak ditangani dengan serius, karena bangunan tersebut merupakan salah satu penyebab timbulnya permasalahannya banjir di Ibukota Jakarta. Dimana bangunan tersebut berfungsi untuk penyerapan air dan lahan hijau.

Rumah dan Bangunan liar juga menimbulkan permasalahan sosial, seperti yang dapat kita lihat dibeberapa tempat dipinggir kali ataupun sungai yang berada disekitar Jakarta. Rata-rata bangunan tersebut tidak beraturan, tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sah dan tidak layak huni. Bukan hanya itu bangunan liar tersebut dilihat dari kondisi yang berada dilingkungan wilayah pinggir kali, sangat bisa dibilang kumuh, ditambah lagi banyaknya masyarakat disekitar lingkungan tersebut yang sering membuang sampah ke kali atau sungai, yang dapat menimbulkan permasalahan sampah di Jakarta. Hal ini merupakan salah satu dari kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang dapat menyebabkan timbul nya banjir

meningkat sehingga berdampak cepat dalam menimbulkan banjir.

Sehubungan dengan upaya menanggulangi banjir tersebut, maka terdapat berbagai lain pun muncul masalah-masalah lain yang timbul sebagai faktor yang timbul dari penyebab banjir. Masalah sampah, curah hujan yang tinggi, peluapan air yang berlebihan, pecahnya bendungan sungai, serapan air yang buruk, hingga pemukiman liar dan pemukiman padat penduduk. Dan warga yang terkena banjir selalu mengambil strategi sendiri untuk menanggulangi banjir ketika banjir datang ke rumah mereka.

Dalam upaya mengurangi jumlah titik genangan banjir, maka dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan dan Pemerintahan infrastruktur pengendali banjir. Banjir yang terjadi hampir setiap tahun di wilayah Jakarta dan sekitarnya, di samping, disamping menimbulkan kerugian harta benda, juga mengganggu kegiatan perekonomian di daerah perniagaan dan daerah permukiman penduduk. Bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya telah terjadi pada tahun 1996 dan tahun 2002 yang telah menimbulkan kerugian 9,80 triliun rupiah, demikian juga kejadian banjir besar pada tahun 2007 telah merendam hampir 70% wilayah DKI Jakarta.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta adalah Dinas yang membantu tugas Gubernur dalam melaksanakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bagian Sumber Daya Air, Air minum dan Drainase yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Maka dari pembangunan dan pengolahan infrastruktur pengendali banjir menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dalam Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pengendali banjir, Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam normalisasi sungai antara lain: pengerukan sungai untuk memperlebar dan memperdalam sungai, pembangunan *sheetpille* atau pembangunan turap batu kali untuk penguatan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul pantai dan muara sungai.

Normalisasi sungai adalah suatu metode yang digunakan untuk menyediakan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi. Normalisasi dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai dikarenakan pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, aliran air yang belum terbagun dengan baik dan penyalahgunaan untuk permukiman.

Degradasi lahan di Jakarta merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya banjir, selain faktor drainase yang sudah tidak mampu menampung air akibat mengalami pendangkalan dan tersumbat akibat sampah yang menumpuk di saluran sehingga kapasitas berkurang, serta intensitas hujan yang tinggi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menerapkan konsep restorasi/naturalisasi sungai. Naturalisasi adalah upaya pembenahan sungai dengan cara alamiah, dengan memperhatikan ekosistem lingkungan. Naturalisasi bertujuan untuk mengelola arus sungai agar air dapat meresap ke dalam tanah di sepanjang perjalanannya ke hilir, misalnya dengan mempertahankan kelokan sungai dan penetapan jalur hijau disepanjang sungai. Dengan adanya restorasi/naturalisasi

sungai diharapkan akan meningkatkan kepedulian penduduk DKI Jakarta terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya sungai dan waduk. Konsep restorasi/naturalisasi sungai ini juga tetap mempertimbangkan salah satu fungsi sungai dan waduk di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengendali banjir.

Pemerintah Pusat saat ini sedang proses membangun 2 (dua) buah bendungan di DAS Ciliwung yang terletak di hulu sungai yang berada di Kabupaten Bogor, dengan memanfaatkan potensi topografi, tampungan, serta geologi, waduk direncanakan dapat mereduksi banjir di hilir Sungai Ciliwung.

Pemerintah telah menyiapkan program penanganan banjir di wilayah Jabodetabek yang terus dikerjakan sampai sekarang, mulai dari wilayah hulu, tengah, dan hilir. Salah satu program tersebut adalah pelebaran sungai. Hal tersebut disampaikan Data yang ada menunjukkan lebar 13 sungai di Jakarta Terus menyusut. Sungai Ciliwung yang semula memiliki lebar sedikitnya 35meter sampai 50 meter, sekarang tinggal 20 Meter sampai 30 meter, bahkan ada yang kurang dari 10 meter. Sungai-sungai lain yang semula memiliki lebar sekitar 20 meter, kini berkurang hingga tinggal 6 Meter sampai 7 meter. Program penanganan banjir di wilayah hulu dilakukan dengan menuntaskan pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Proses pembebasan lahan telah selesai sekitar 90 persen dan pembangunan mencapai 45 persen.

Untuk pelebaran sungai, Basuki mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ikut berkolaborasi untuk pengadaan tanah. “Pemprov tugasnya adalah bebaskan lahan. Kami membangunnya. Itu Kalobariasinya,” Menurut Pak Basuki. Meski sejumlah pihak menyebut normalisasi sungai belum

efektif mengatasi banjir, Basuki mengatakan hal itu harus dilihat secara terperinci. Sebelumnya, Basuki menyatakan dari 33 Kilometer panjang Sungai Ciliwung yang harus dinormalisasi sekitar 16 Kilometer telah selesai dilakukan. Hasilnya, wilayah di sisi sungai yang telah dinormalisasikan tidak kebanjiran. Kemudian, pihaknya juga membuat sudetan dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Basuki meyakini aliran air 60 Meter kubik per detik yang melewati proyek itu akan sangat membantu mengurangi debit banjir.

Upaya selanjutnya yang di lakukan Dinas Sumber Daya Air adalah melakukan pembangunan sudetan untuk membantu mengurangi debit banjir di Sungai Ciliwung dengan mengalihkan 60 Meter kubik perdetik debit air ke Banjir Kanal Timur (BKT). Untuk percepatan pelaksanaan sudetan dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang telah diajukan perbaikan penetapan lokasi dari Kempupera melalui Bailai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung–cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 26 Desember 2019. Masyarakat setempat telah menyetujui permanfaat lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 Meter dari keseluruhan 1.200 meter.

Sehubungan dengan cara untuk mencoba menanggulangi banjir tersebut, maka berbagai masalah penyebab banjir pun mulai muncul dari masalah sampah, curah hujan yang tinggi, peluapan air yang berlebihan, pecahnya bendungan sungai, serapan air yang buruk, hingga permukiman liar pemukiman padat penduduk. Dan warga yang terkena banjir selalu mengambil strategi sendiri untuk menanggulangi banjir ketika banjir datang ke rumah mereka.

Pentingnya melakukan penulisan untuk membahas penyebab banjir di daerah tersebut, maka penulis tertarik untuk memberik judul dalam laporan skripsi ini tentang **“EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN BANJIR KALI CILIWUNG DI PROVINSI DKI JAKARTA“**

1.2 Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan penentuan terhadap tujuan penelitian sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam melakukan penganalisaan yang sedang di teliti oleh peneliti. Selain itu, fokus penelitian juga merupakan juga batas ruang dalam pengembangan penelitian agar penelitian, fokus penelitian bersifat tentative sesuai dengan berlangsungnya penelitian.

Dari pemaparan latar belakang diatas. Maka penelitian memfokuskan penelitian ini pada Evaluasi Kebijakan Penanganan Banjir Kali Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Penanganan Banjir Kali Ciliwung Di Provinsi DKI Jakarta
2. Faktor-faktor apa saja yang terdapat pada Evaluasi Kebijakan Penanganan Banjir Kali Ciliwung Di Provinsi DKI Jakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Penanganan Banjir Kali Ciliwung Di Provinsi DKI Jakarta
2. Mendeskripsikan Serta Mengetahui Apa Saja Faktor-Faktor Yang Terdapat Pada Evaluasi Kebijakan Penanganan Banjir Kali Ciliwung Di Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis, tetapi juga memiliki kegunaan yang bersifat praktis. Kegunaan yang diharapkan dari peneliti terhadap penelitian ini, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, untuk penulis berharap agar penelitian ini dapat menambah wawasan penulisan sebagai bahan perbandingan antara teori yang dipelajari dengan praktek yang diterapkan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari beberapa penelitian tersebut dan hasil pengamatan di lapangan.
2. Secara praktis, penulis juga berharap program – program pemerintah Kota Jakarta membuat masyarakat semakin aktif dan peduli dalam mewujudkan yang bebas banjir penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial.

1.4.1 Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat serta menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa/mahasiswi Administrasi Publik juga menjadi bahan dasar tinjauan pustaka penelitian yang berkaitan dengan tentang **“EVALUASI KEBIJAKAN PENANGAN BANJIR KALI CILIWUNG DI PROVINSI DKI JAKARTA”**. Serta Hasil Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi/ bahan kepustakaan dalam mengembangkan Administrasi Publik untuk menganalisis Kebijakan Publik.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kebijakan Penanganan Banjir Kali Ciliwung Di Provinsi DKI Jakarta.